

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kebijakan

Pemerintah sangat berperan penting dalam menentukan segala hal termasuk kebijakan, karena pemerintah memiliki tugas pokok dalam menjalankan peran dan tugas nya. Seperti pengaturan, pelayanan publik, perlindungan, pengumpulan pajak dan pengeluaran, pembangunan ekonomi, pendidikan serta hubungan internasional.

Salah satu tugas pemerintah yaitu pelayanan publik yang berupa layanan kesehatan, pemerintah sangat berperan penting dalam menentukan kebijakan terkait layanan kesehatan. Dalam kasus peneliti yang akan peneliti teliti ingin melihat layanan kesehatan yang pemerintah lakukan dalam menanggapi covid-19.

Pada hakikatnya terdapat banyak teori atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (policy). Setiap teori tersebut memberi penilaian yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena setiap teoritis mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa

suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (Wahab, 2004 : 2). Berdasarkan pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh PBB tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan pedoman yang berisi deklarasi mengenai suatu program, rencana, ataupun aktivitas tertentu.

Kurniasih (2017) terdapat beberapa faktor yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yaitu: faktor sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, komunikasi, serta struktur dari birokrasi dimana turut berkontribusi bagi keberhasilan suatu kebijakan .

Menurut Adibowo (2013) kebijakan berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah.

Menurut Kuncoro dalam bukunya yang berjudul 69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia, pengertian kebijakan adalah :

“Kebijakan memiliki pengertian kata yang merujuk rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.”
(Kuncoro, 2012 : 170).

Menurut Kuncoro, kebijakan pada dasarnya adalah rangkaian konsep dan asas, yang berarti bahwa kebijakan pada dasarnya adalah konsep dan asas yang akan digunakan sebagai dasar dalam rencana untuk melaksanakan suatu tugas, baik dalam negara dan organisasi. Sedangkan pengertian lain dari kebijakan menurut Friedrich dalam Wahab sebagai berikut :

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”
(Wahab, 2004 : 3)

Kebijakan adalah tindakan untuk mencapai tujuan dengan mengatasi tantangan saat ini dan mencari peluang baru untuk mencapainya. Dengan mempertimbangkan definisi kebijakan ini, Winarno (2005 : 16) mengingatkan bahwa “dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan.”

Karena kebijakan adalah suatu proses yang mencakup tahap implementasi dan evaluasi, definisi kebijakan yang hanya menekankan apa yang diusulkan tidak memadai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan harus mempertimbangkan situasi sebenarnya, bukan hanya masalah.

Selanjutnya Wahab juga mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri sebenarnya masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. “Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembagalembaga pemerintah.

10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.”
(Wahab 2008 : 40-50)

Pedoman yang disampaikan Wahab mengenai istilah “kebijakan” di atas membedakan antara kebijakan dan keputusan serta menyatakan bahwa kebijakan mempunyai tujuan. Terkait kebijakan publik dijelaskan bahwa kebijakan publik berkaitan dengan pentingnya peran lembaga negara. Thomas Dye dalam Subarsono (2005 : 2) memberikan definisi kebijakan publik yaitu “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.” Definisi tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan bukan swasta; kebijakan publik itu menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Selanjutnya Pressman dan Widavsky dalam Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan.” Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah (APPPTM, 2015 : 324).

Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.” Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka

dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas (APPPTM, 2015 : 324).

William N. Dunn menyebutkan pengertian kebijakan publik adalah sebagai berikut :

“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.”

(Dalam Wibawa 2003 : 109)

Berdasarkan pendapat Dunn di atas, Diketahui bahwa kebijakan publik mempunyai banyak pilihan kolektif mengenai ketergantungan pada sesuatu, termasuk keputusan untuk bertindak. Kebijakan publik ini ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah. Cakupan penelitian kebijakan publik sangat luas, meliputi berbagai bidang dan bidang seperti ekonomi, politik, kemasyarakatan, kebudayaan, dan hukum. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota (APPPTM, 2015 : 323).

Penelitian kebijakan publik merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan pemerintah. Ada kecenderungan di kalangan ilmuwan politik untuk semakin tertarik mempelajari kebijakan publik, Thomas Dye sebagaimana dikutip Wahab sebagai berikut :

“Studi ini mencakup upaya menggambarkan isi kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan

terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat dari berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”
(Wahab, 2004 : 11-12)

Pendapat Wahab di atas menjelaskan bahwa studi dari pada kebijakan publik pada dasarnya meliputi isi dari kebijakan publik itu sendiri, penilaian atas dampak yang ditimbulkan dari kebijakan publik, serta akibat yang ditimbulkan dari adanya kebijakan publik terhadap masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Kebijakan publik semakin relevan untuk dikaji karena persoalan-persoalan aktual yang muncul dari berbagai kebijakan atau program pemerintah. Bahkan bila kebijakan publik dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka minat untuk mengkaji kebijakan publik telah berlangsung sejak amat lama, bahkan sejak zaman Plato dan Aristoteles, walaupun saat itu studi mengenai kebijakan publik masih terfokus pada lembaga-lembaga negara saja (Winarno, 2005 : 16). Wahab dengan mengikuti pendapat dari Anderson dan Dye menjelaskan tiga alasan mengapa kebijakan publik perlu dipelajari, yaitu :

1. “Alasan ilmiah (scientific reason)

Dari sudut ini, maka kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses-proses perkembangannya dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan menambah pengertian tentang sistem politik dan masyarakat secara umum. Dalam konteks seperti ini, maka kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent variable). Jika kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Misalnya, bagaimana kebijakan dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan (power) antara kelompok-kelompok penekan dan

lembaga-lembaga pemerintah? Bagaimana urbanisasi dan pendapatan nasional membantu dalam menentukan atau mempengaruhi isi atau muatan kebijakan? Sebagai variabel bebas, dapat dipertanyakan bagaimana kebijakan mempengaruhi dukungan bagi sistem politik atau pilihan-pilihan kebijakan masa depan? Pengaruh apa yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan sosial masyarakat? Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan? Dengan demikian kebijakan publik dipandang sebagai variabel bebas bila fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan terhadap sistem politik dan lingkungan.

2. Alasan profesional (professional reason) Studi kebijakan dimaksudkan untuk menghimpun pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Dalam hal ini Don K. Price (1964) membuat perbedaan antara tingkatan ilmiah (the scientific estate) yang berusaha menetapkan pengetahuan dan tingkatan profesional (the professional estate) yang berusaha menerapkan pengetahuan ilmiah kepada penyelesaian masalah-masalah sosial praktis. Beberapa ilmuwan politik setuju bahwa seorang ilmuwan dapat membantu menentukan tujuan-tujuan kebijakan publik, namun beberapa yang lain tidak sependapat. James E. Anderson termasuk yang mendukung profesionalitas (bukan hanya saintifik). Menurutnya, jika kita mengetahui sesuatu tentang fakta-fakta yang membantu dalam membentuk kebijakan publik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, jika kita tahu bagaimana individu, kelompok atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri. Oleh karenanya menurut Anderson adalah sesuatu yang sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah maupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan-persoalan dengan baik. Tentunya pengetahuan yang didasarkan pada fakta adalah prasyarat untuk menentukan dan menghadapi masalah-masalah masyarakat.
3. Alasan politis (political reason) Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. Sebagaimana telah diuraikan di atas beberapa ilmuwan politik cenderung pada pilihan bahwa studi kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk memastikan apakah pemerintah mengambil kebijakan yang pantas untuk mencapai tujuan-tujuan yang tepat. Mereka menolak pendapat bahwa analisis kebijakan harus bebas nilai. Bagi mereka ilmuwan politik tidak dapat berdiam diri atau tidak berbuat apa-apa mengenai masalah-masalah politik. Mereka ingin memperbaiki kualitas kebijakan politik dalam cara-cara menurut yang mereka sangat diperlukan, meskipun dalam masyarakat seringkali

terdapat perbedaan substansial mengenai kebijakan apa yang disebut „benar“ dan „tepat“ itu.”
(Wahab, 2004 : 12-14).

Tiga alasan di atas mengapa kita perlu mempelajari kebijakan publik merupakan alasan yang relevan saat ini. Alasan pertama, yang bersifat ilmiah, adalah bahwa kebijakan publik merupakan ilmu yang sebenarnya perlu dipelajari. Karena itu memperkaya pengetahuan kita. Kedua, ada pertanyaan apakah mempelajari kebijakan publik dapat memecahkan masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari karena alasan profesional. Berikutnya, alasan politik terakhir atau ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik politik kita, pemerintah banyak mengambil tindakan publik demi kepentingan rakyat.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu sebagai berikut :

1. “Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.”
(APPPTM, 2015 : 324).

Ciri-ciri kebijakan publik di atas menjelaskan bahwa kebijakan publik sebenarnya mudah untuk dipahami dan diukur. Yang dimaksud dengan “mudah dipahami” adalah kemudahan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pedoman pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sekarang lebih mudah untuk mengukurnya. Dengan kata lain, pengukuran dalam politik, yaitu mengukur sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, sudah menjadi jelas.

Kebijakan publik memiliki ciri-ciri yang dikemukakan Wahab antara lain :

1. “Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakankebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabatpejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
3. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.”
(Wahab, 2004 : 5)

Berdasarkan pendapat Wahab di atas, ciri-ciri kebijakan publik pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang mempunyai tujuan dan saling berkaitan, ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kondisi terjadinya tertentu, dan mempunyai muatan politik, terlihat termasuk di dalamnya. Intervensi pemerintah bisa berdampak positif atau negatif tergantung bagaimana kebijakan tersebut dikeluarkan dalam kondisi tertentu.

Adapun mengenai kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu :

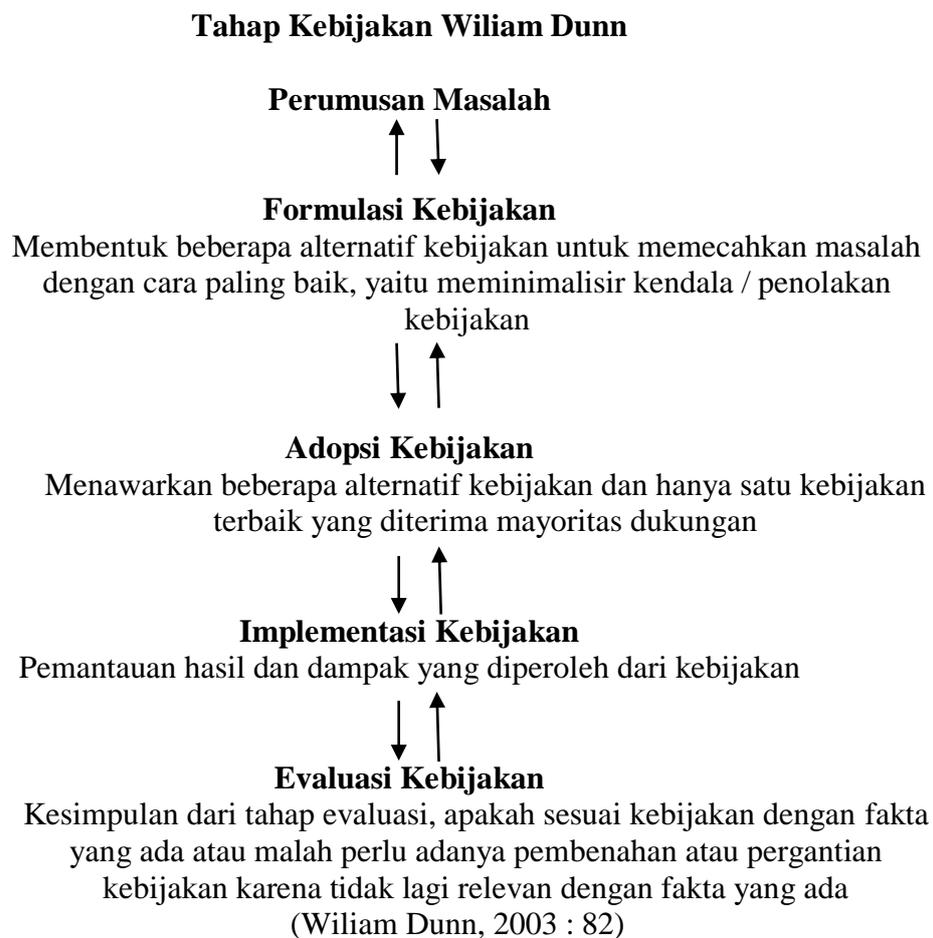
1. “Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
2. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.

3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis.”
(Suharno, 2010 : 31)

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu, yaitu tujuan individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Kebijakan publik, di sisi lain, adalah penggunaan strategis sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah publik atau pemerintahan di berbagai bidang dan sektor, seperti: Ekonomi, politik, masyarakat, budaya, hukum, dan lain sebagainya.

Kebijakan lahir dari suatu proses pembuatan kebijakan publik yang merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan banyak alur proses. Tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan ini, bukan termasuk proses akhir dari kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Di dalam setiap proses terdapat tahap-tahap kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2..1 Tahap Kebijakan Wiliam Dunn



Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa tahapan-tahapan dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda
Pada tahap ini pejabat pemerintah terpilih merumuskan masalah secara bersama berdasarkan skala prioritas dan kepentingan masyarakat.
2. Formulasi Kebijakan
Rumusan masalah yang telah masuk dalam penyusunan agenda selanjutnya dicari pemecahannya dengan membuat berbagai alternatif pemecahan masalah.
3. Adopsi kebijakan
Berbagai alternatif pemecahan masalah yang ada selanjutnya dipilih satu yang terbaik berdasarkan hasil keputusan bersama para pejabat pemerintah yang berwenang.

4. Implementasi Kebijakan
Alternatif pemecahan masalah yang terpilih selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk kebijakan program.
5. Evaluasi Kebijakan
Implementasi kebijakan program tersebut selanjutnya dievaluasi apakah sudah sesuai dengan kondisi lapangan yang ada, serta untuk melihat sejauh mana keberhasilan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Berdasarkan pendapat Willian N Dunn di ketahui bahwa dalam menentukan sebuah kebijakan ada beberapa tahapan – tahapan yang harus di perhatikan dengan bertujuan untuk digunakan sebagai penentu dalam membuat kebijakan terhadap permasalahan yang terjadi.

2.1.2 Evaluasi

Menurut Arikunto dan Cepi dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Program Pendidikan, pengertian evaluasi adalah sebagai berikut :

“Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.”

(Arikunto dan Cepi, 2008 : 2)

Evaluasi berdasarkan pengertian di atas merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi akan bekerjanya sesuatu dengan tujuan untuk digunakan sebagai informasi dalam proses penentuan kebijakan. Sedangkan pada pengertian lain, “Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi” (Djaali dan

Pudji 2008 : 1). Pengertian evaluasi sesuai apa yang dikemukakan Djaali dan Pudji diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian atas tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan tersebut akan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi.

Adapun tujuan dan atau fungsi evaluasi menurut Crawford adalah :

1. “Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.”
(Crawford, 2000 : 30)

Berdasarkan pendapat Crawford diketahui bahwa penilaian pada dasarnya mempunyai tujuan dan fungsi untuk mengetahui tujuan, menjamin objektivitas pengamatan, mengenali keterampilan, dan memberikan umpan balik. Berdasarkan tujuan dan fungsi evaluasi ini, evaluator akan lebih fokus dalam melakukan evaluasi. Selain memiliki tujuan dan fungsi, evaluasi juga memiliki standar tertentu dalam prosesnya terhadap suatu kegiatan. Menurut Umar, standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu :

1. “Utility (manfaat)
Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
2. Accuracy (akurat)
Informasi atas hasil evaluasi hendaknya memiliki tingkat ketepatan tinggi.
3. Feasibility (layak)
Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.”
(Umar, 2002 : 40)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa evaluasi merupakan proses penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan tiga aspek utama standar evaluasi, yaitu meliputi utility (manfaat), accuracy (akurat), dan feasibility (layak).

Secara umum, evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, yaitu :

Fokus nilai

1. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi Fakta-Nilai
Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”.
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau
Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. Dualitas nilai
Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.”
(Dalam Wibawa, 2003 : 608)

Berdasarkan pembahasan di atas, kita dapat melihat bahwa salah satu ciri utama kegiatan evaluasi adalah fokusnya pada nilai-nilai, yaitu evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan. Terdapat saling ketergantungan antara fakta dan nilai, yaitu evaluasi harus didasarkan pada bukti dalam praktik untuk menentukan apakah tujuan kebijakan benar-benar tercapai. Orientasi masa kini dan masa lalu. Artinya, evaluasi berfokus pada persyaratan saat ini dan masa lalu. Dualitas nilai atau nilai ganda, atau evaluasi, dapat dilihat sebagai tujuan dan sarana.

2.1.3 Evaluasi Kebijakan

Dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat diketahui apakah kebijakan itu sudah dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan dan mengenai sasaran serta dapat mencapai tujuan pedoman maka perlu diadakan evaluasi kebijakan. Sebab dengan evaluasi kebijakan, kita dapat mengetahui pelaksanaan kebijakan dan pengukuran hasil-hasil yang dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Samodra Wibawa dkk, bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan tersebut bermaksud mengetahui aspek proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan (Hardjanti, 2009 : 29).

Pengertian evaluasi kebijakan menurut Muhadjir Darwin bersama Wahyu Nurhardjamo adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang ditentukan (Hardjanti, 2009 : 29). Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2008 : 166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah evaluasi yang mengukur seberapa baik suatu kebijakan telah berjalan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut menurut Nugroho menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

1. “Eksplanasi
Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
2. Kepatuhan
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit
Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting
Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.”
(Nugroho, 2011:463)

Pendapat Nugroho menyatakan bahwa fungsi-fungsi dari evaluasi kebijakan meliputi ekspansi, yaitu melalui evaluasi dapat terlihat realitas pelaksanaan potret-potret evaluasi di lapangan, kemudian kepatuhan, yaitu melalui evaluasi dapat terlihat apakah tindakan kebijakan yang selama ini dilakukan oleh para pelaku kebijakan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak. Selanjutnya adalah audit, yaitu melalui evaluasi akan terlihat apakah output dari kebijakan benar-benar tepat sasaran atau tidak, dan yang terakhir adalah akunting, yaitu melalui evaluasi akan dapat dilihat bagaimana akibat sosial ekonomi dari kebijakan yang diterapkan.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. “Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi,

dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum

3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan

(Bambang Sunggono, 1994 : 158)

Unsur-unsur kebijakan tersebut di atas haruslah dapat dipenuhi agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai sasaran yang memang diharapkan demi kepentingan masyarakat sebagai objek kebijakan dengan ditunjang ketersediaan fasilitas yang memadai dan didukung oleh mentalis aparat penegak hukum atau penegak kebijakan. Menurut Subarsono terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam evaluasi kebijakan, antara lain :

1. “Kendala Psikologis

Secara psikologis, masih banyak aparat pemerintah atau pengambil dan pelaksana kebijakan yang alergi dengan kegiatan evaluasi. Hal itu disebabkan oleh adanya asumsi bahwa evaluasi kebijakan sangat mempengaruhi karir pelaksana kebijakan. Sehingga ada kekhawatiran sangat dini bahwa jika evaluasi yang dilakukan menunjukkan hasil yang jelek, maka akan menghambat promosi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya masih sangat umum bahwa pengambil dan para pelaku kebijakan masih menganggap kegiatan evaluasi tidak sewajib metode-metode analisis kebijakan publik sebelumnya, bahkan tak jarang evaluasi hanya dianggap sebagai kegiatan pelengkap yang boleh tidak dilaksanakan.

2. Kendala Ekonomis

ekonomis Bagaimanapun kegiatan evaluasi tetap saja membutuhkan anggaran tertentu sesuai dengan bobot pekerjaan yang akan diambil sesuai dengan metode dan relevansinya. Secara umum, kegiatan evaluasi

membutuhkan biaya yang tidak murah, misalnya untuk pengumpulan data, pengolahan data, para staf dan evaluator. Untuk itu, hampir tidak mungkin melakukan evaluasi kebijakan tanpa adanya dukungan finansial yang cukup. Di tambah lagi, dalam keadaan finansial yang kurang memadai, kegiatan evaluasi seringkali mendapatkan proporsi yang kecil dibandingkan metode-metode analisis kebijakan sebelumnya, sehingga dapat saja evaluasi yang dilakukan tidak optimal.

3. Kendala Teknis

teknis Evaluator seringkali dihadapkan pada beberapa hambatan teknis, seperti tidak tersedianya data yang mutakhir dan walaupun ada data yang tersedia secara kualitatif kurang baik. Di samping itu, suplai data seringkali dipandang sebagai kegiatan formalitas, sehingga substansi dari data tersebut kurang diperhatikan.

4. Kendala Politis

politis Suatu kebijakan dapat saja diwarnai oleh kepentingan dan tawar menawar politik tertentu dari kekuatan politik baik di dalam maupun di luar struktur pemerintahan. Dalam keadaan yang demikian evaluasi kebijakan akan sangat sulit untuk dapat dilakukan secara fair dan terbuka.

5. Kendala Sumber daya

sumber daya evaluasi Pekerjaan mengevaluasi suatu kebijakan bukanlah hal gampang. Kegiatan evaluasi memerlukan kompetensi khusus, sesuai dengan bidang kebijakannya. Beberapa lembaga pemerintahan tidak memiliki cukup sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang evaluasi ini. Tanpa kompetensi khusus di bidang evaluasi, sangat sulit untuk melaksanakan kegiatan evaluasi atas kinerja kebijakan yang diambil. Kalupun evaluasi dilaksanakan, tentu hasilnya tidak optimal dan kurang menggambarkan keadaan hasil kebijakan yang senyatanya.”

(Subarsono, 2005 : 130-131).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan evaluasi kebijakan publik tidak selalu dapat berjalan mulus, karena terdapat 25 beberapa kendala yang mungkin dihadapi, yaitu meliputi kendala psikologis, kendala ekonomis, kendala teknis, kendala politis, dan kendala sumber daya evaluasi. Kendala-kendala ini dapat muncul dikarenakan kegiatan evaluasi kebijakan bukanlah suatu kegiatan yang mudah.

Menurut Winarno, evaluasi kebijakan terbagi ke dalam tiga tipe, yaitu :

1. “Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

2. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

3. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.”

(Winarno, 2008 : 229)

Berdasarkan pendapat winarno tersebut di atas, diketahui bahwa evaluasi kebijakan memiliki tiga tipe, yaitu tipe pertama yang dipahami sebagai kegiatan fungsional, tipe kedua yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan, dan tipe ketiga melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan.

Menurut Wilian N. Dun dalam menentukan evaluasi kebijakan terdapat

Kriteria dalam evaluasi kebijakan yakni:

“*Effectiveness* (Efektivitas), *Efficiency* (Efisiensi), *Adequacy* (Kecukupan), *Equity* (Pemerataan), *Responsiveness* (Responsivitas), *Appropriateness* (Ketepatan).”

(Dunn, 2018:197).

Maksud pendapat kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan Wilian N

Dunn antara lain:

1. *Effectiveness* (Efektivitas)

“*Effectiveness refers to the achievement of a valued outcome . effectiveness a property of technical rationalty is measured in terms of a units of products or services or their monetary value.*”

(Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil akibat yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya)

2. *Efficiency* (Efisiensi)

“Efficiency refers to the amount of effort required to produce a given level of effectiveness. efficiency which is a property of economic rationality, is calculated as the cost of producing a unit of product or service for example dollar per gallon of irrigation water or dollars per medical examination”

(Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien)

3. *Adequacy* (Kecukupan)

“Adequacy refers to a policy that achieves a defined threshold of effectiveness”

(kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah)

4. *Equity* (Pemerataan)

“Equity refers to the distribution of outcomes and effort among different groups in society”

(kriteri erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat)

5. *Responsiveness* (Responsivitas)

“ Responsiveness refers to the extent that a policy satisfies the needs, preferences, or interests, of particular groups”

(Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu)

6. *Appropriateness* (Ketepatan)

“Appropriateness refers to the value or worth of a program's outcomes and to the tenability of assumptions underlying these objectives”.

(Ketepatan Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut)

(Dunn, 2018:197).

2.1.4 Corona Virus Disease (Covid-19)

Covid-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus coronavirus jenis baru. Penyakit ini diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019 (WHO, 2020). *Covid-19* merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh novel coronavirus atau SAR-Cov-2 (Erlich, 2020). Surat Keputusan menteri kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 *Covid-19* menetapkan Infeksi Novel Coronavirus Infeksi 2019-nCov sebagai jenis penyakit yang bisa menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya, peraturan ini dikeluarkan atas pertimbangan WHO yang menyatakan bahwa infeksi 2019-nCov sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) (Wahidah et al., 2020).

2.1.5 Vaksinasi

Vaksin adalah sejenis ramuan biologi yang di dalamnya terkandung antigen yang mana nantinya pada saat diberikan kepada manusia akan secara aktif mengembangkan kekebalan khusus terhadap penyakit tertentu sesuai dengan vaksin apa yang digunakan atau untuk kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit yang disebabkan oleh virus tertentu. Dalam hal ini, berbagai negara, salah satunya termasuk Indonesia, sedang berupaya melakukan pengembangan vaksin dengan jenis virus SARS-CoV-2 dengan penentuan kelayakan atau cocok tidaknya dalam pencegahan infeksi virus tersebut, pada

berbagai platform, yaitu vaksin virus yang dilemahkan, vaksin hidup dilemahkan, vaksin vektor virus, vaksin asam nukleat, bahkan ada juga vaksin yang dikembangkan dari protein mirip virus,) dan vaksin subunit protein. Dengan demikian peran pemerintah dalam upaya membuat atau mengembangkan vaksin dapat mengurangi penyebaran Covid-19, setidaknya dapat meminimalisir angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, memiliki ketercapaian dalam sistem imunitas kelompok dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari virus Covid-19, sehingga pada akhirnya dapat menjaga produktivitas sosial dan ekonomi (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020).

Berdasarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan menurut Wilian N. Dun , maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik dapat diukur dengan enam kriteria, yaitu *Effectiveness* (Efektivitas), *Efficiency* (Efisiensi), *Adequacy* (Kecukupan), *Equity* (Perataan), *Responsiveness* (Responsivitas), dan *Appropriateness* (Ketepatan).

2.2 Kerangka Pemikiran

Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai atau mengukur efektivitas, kinerja, atau hasil suatu kegiatan, program, atau kebijakan. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk memahami sejauh mana suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan pelaksanaan tersebut.

Dalam konteks kebijakan publik atau program-program pemerintah, evaluasi seringkali dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan atau program tersebut terhadap masyarakat, lingkungan, atau sektor tertentu. Evaluasi ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, dan dampak sosial atau ekonomi yang dihasilkan. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan “Evaluasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Bandung”. Dalam menentukan hasil evaluasi kebijakan vaksinasi ini. Sesuai dengan kriteria evaluasi yang dikatakan oleh Wilian N. Dunn yang berdarkan aspek

1. Efektivitas (harapan, realisasi)

Efektivitas mengacu pada kemampuan suatu tindakan untuk menghasilkan dampak yang diharapkan atau yang diinginkan. Yang dimana Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung membuat kebijakan vaksiansi sebagai tindakan yang dilakukan dalam penanganan penyebaran covid-19.

- a. Harapan adalah Tercapainya target vaksinasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung melalui Dinasi Kesehatan dalam menangani penyebaran covid-19 di Kota Bandung.
- b. Realisasi adalah Ketercapain pelaksanaan vaksiansi Covid-19 di Kota Bandung yang dilakukan Dinas Kota Bandung.

2. Efisiensi

Dalam penanganan penyebaran covid-19 upaya Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas kesehatan Kota Bandung mengadakan vaksinasi gratis guna untuk menangani covid-19 akan tetapi hal ini tidak lepas dari sumber daya dan optimalisasi.

- a. Sumber Daya yang peneliti maksud ialah petugas yang melakukan vaksinasi dan petugas yang memberikan sosialisasi atau informasi covid-19.
- b. Optimalisasi Dalam penanganan covid-19 Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung guna untuk mengoptimalkan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat.

3. Kecukupan

Dalam menangani penyebaran covid-19 untuk melihat tingkat efektivitas kecukupan dilihat dari kebutuhan, nilai, kesempatan dalam menjalankan program vaksinasi.

- a. Kebutuhan guna untuk mencegah penyebaran covid-19 yang dibutuhkan ialah vaksinasi, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung selalu mengadakan vaksinasi.
- b. Nilai yang dimaksud ialah sudah berapa jauh vaksinasi dilakukan serta memiliki dampak negati atau positif selama pelaksanaan vaksinasi
- c. Kesempatan yang dimaksud ialah pemerintah memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat Kota Bandung, sehingga masyarakat bisa vaksin tanpa mengeluarkan biaya.

4. Pemerataan

Mengacu pada pendistribusian serta usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam melakukan program vaksinasi. Adapun operasional dari pemerataan yakni:

- a. Distribusi yang dimaksud ialah Pemerintah Kota Bandung dalam mendistribusikan vaksiansi akan menyesuaikan berapa jumlah masyarakat di setiap kecamatan yang ada di Kota Bandung hal ini bertujuan untuk ketepatan dalam melakukan vaksinasi.
- b. Usaha. Pemerintah Kota Bandung selalu berusaha untuk mencegah penyebaran covid-19 dengan melakukan vaksiansi melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung

5. Responsivitas

Mengacu kepada tindakan yang dilakukan dalam suatu masalah atau kejadian guna untuk menangani permasalahan yang terjadi. Dalam permasalahan covid-19 Pemerintah mengambil tindakan berupa kebijakan vaksiansi gratis melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung yang bertujuan agar masyarakat mau vaksin. Dalam operasional nya responsivitas terbagi menjadi dua yakni:

- a. Responsivitas Pemerintah Untuk menangani penyebaran kasus covid-19 Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kota Bandung membuat kebijakan vaksinasi gratis.

- b. Responsivitas Masyarakat Respon masyarakat terhadap kebijakan vaksin yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung awalnya berjalan dengan baik akan tetapi dari data yang peneliti dapatkan dari Website PUCISOV terjadi penurunan.

6. Ketepatan

Pemerintah Kota Bandung membuat kebijakan vaksinasi gratis menganggap kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat bertujuan untuk mencegah penyebaran covid-19 dan supaya masyarakat Kota Bandung mau melakukan vaksinasi. Dalam operasional nya ketepatan terbagi menjadi dua yakni:

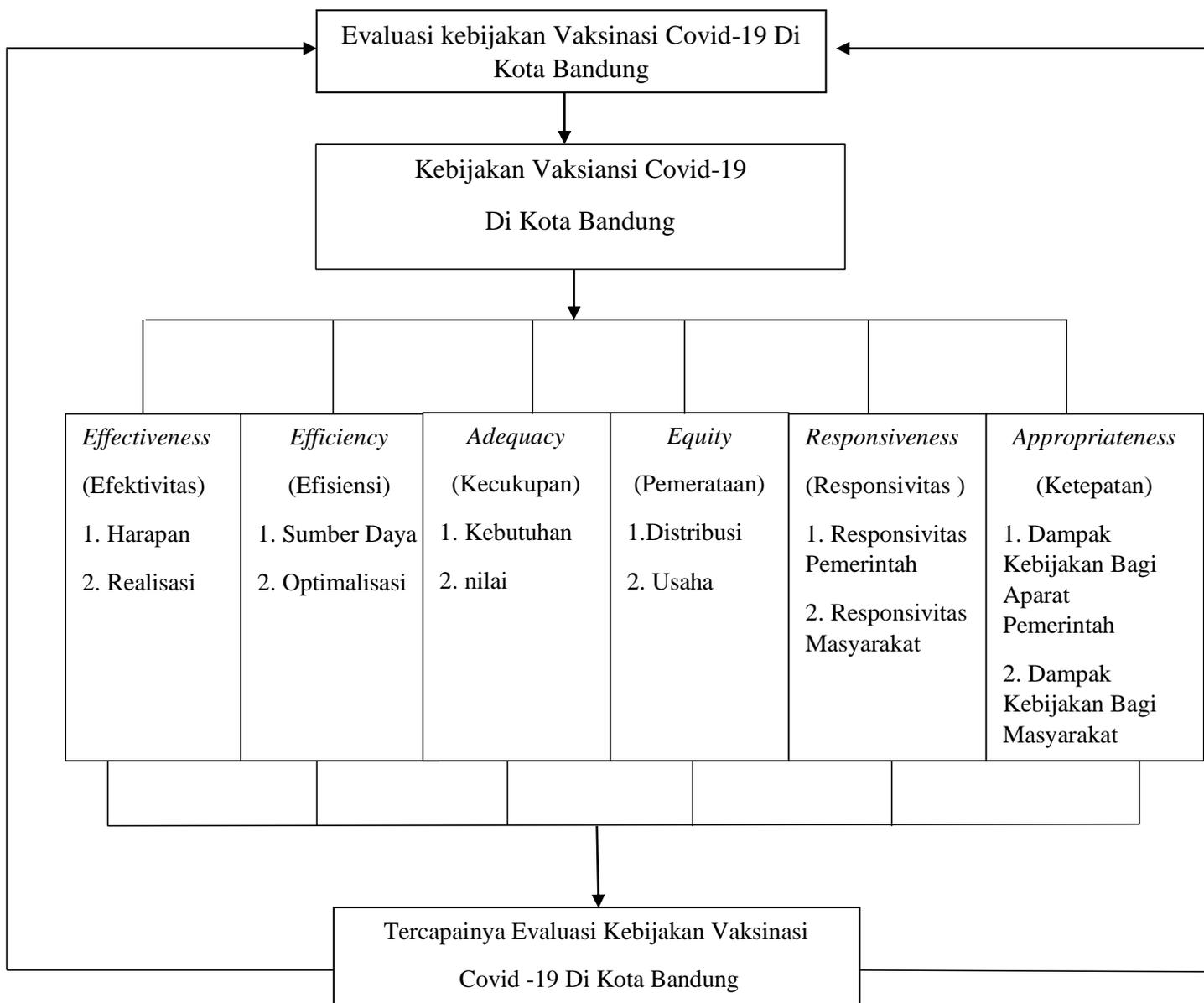
- a. Dampak Kebijakan Bagi Aparat Pemerintah. Pemerintah kota Bandung dan Dinas Kesehatan kota Bandung berharap dampak adanya kebijakan vaksiansi gratis ini masyarakat mau melakukan vaksiansi agar jumlah yang terkena covid-19 dapat menurun.
- b. Dampak Kebijakan Bagi Masyarakat. Dengan adanya vaksiansi gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung berdampak positif bagi masyarakat agar mau melakukan vaksiansi tanpa mengeluarkan biaya.

Indikator kriteria evaluasi yang dikatakan Wiliam N. Dun merupakan tolak ukur untuk peneliti terkait dengan Evaluasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Bandung.

Berikut ini merupakan bagan yang telah dimodifikasi oleh peneliti untuk memperjelas sebagai bahan tambahan dari kerangka teori yang telah diuraikan di atas.

Gambar 2.2 Model Kerangka Pemikiran

Model Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2024

2.3. Proposisi

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka proposisi pada penelitian ini adalah Keberhasilan Evaluasi Kebijakan vaksinasi covid-19 di Kota Bandung di tentukan dari aspek *Effectiveness* (Efektivitas), *Efficiency* (Efisiensi), *Adequacy* (Kecukupan), *Equity* (Pemerataan), *Responsiveness* (Responsifitas), dan *Appropriateness* (Ketetapan).